

ABSTRAK

Asas umum dalam demokrasi mengartikan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk tahanan di dalam penjara. Pemilu inklusif adalah tujuan yang akan dicapai dari semua upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam menjamin hak pilih setiap tahanan. Namun, berdasarkan data pemilih pemilu 2019 bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru, tahanan yang dapat memilih berada pada kisaran 23% dari total seluruh tahanan, dan hanya 44% tahanan yang terdaftar sebagai pemilih di seluruh Lapas dan Rutan yang tersebar di Indonesia. Kepemilikan KTP-el yang merupakan syarat legal untuk terdaftar sebagai pemilih menjadi masalah bagi tahanan. Penelitian ini memaparkan upaya yang dilakukan oleh KPU Banjarbaru sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pemilu inklusif, dalam arti upaya untuk menjamin hak pilih bagi tahanan di dalam penjara. Penelitian ini juga menganalisis hambatan yang dihadapi, sekaligus mengevaluasi efektifitas upaya yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Banjarbaru pada dasarnya dapat membuat terlaksananya pemungutan suara di lembaga pemasyarakatan, namun belum memenuhi kriteria pemilu inklusif. Hambatan utama terdapat dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih di Lapas, yang mana tidak tersedianya identitas KTP-el/salinan identitas dari tahanan, sedangkan sistem informasi data tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat memberikan informasi perihal elemen data kependudukan yang valid seperti yang terdapat dalam KTP-el. Sehingga banyak tahanan yang tidak bisa di daftarkan sebagai pemilih. Permasalahan ketersediaan surat suara juga menjadi hambatan ketika pelaksanaan pemungutan suara di lapas , yang mengakibatkan pemungutan suara harus dimulai pada sore hari dan selesai malam hari. Terhadap hasil analisis dan valuasi terhadap pelaksanaan pemilu 2019 di Lembaga Pemasyarakatan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi, termasuk desain proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih di Lembaga Pemasyarakatan yang berbeda mekanismenya dengan yang diterapkan sebelumnya. Desain ini bertujuan untuk mengurangi jumlah tahanan yang tidak dapat memilih, dan meningkatkan pencapaian indikator pemilu inklusif.

Kata kunci : tahanan, hak pilih , hak untuk memilih, pemilu inklusif

ABSTRACT

The general principle in democracy means that every citizen has the same opportunity to participate in elections, including prisoners in prison. An inclusive election is a goal that will be achieved from all efforts made by the election organizers to guarantee the right to vote for each prisoner. However, based on 2019 election voter data that in the Banjarbaru Prison, prisoners who can vote are in the range of 23% of the total prisoners, and only 44% of prisoners are registered as voters in all Prisons and Detention Centers in Indonesia. The ownership of KTP-el, which is a legal requirement to be registered as a voter, is a problem for prisoners. This study describes the efforts made by the KPU Banjarbaru as an election organizer at the Regency / City level to realize inclusive elections, in the sense of efforts to guarantee suffrage for prisoners in prison. This research also analyzes the obstacles faced, while evaluating the effectiveness of the efforts that have been made. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out by in-depth interviews, observations, and literature studies. The results showed that various efforts made by the KPU Banjarbaru could basically make the implementation of voting in prisons, but did not meet the criteria for inclusive elections. The main obstacles are in the process of compiling and updating voter data in prisons, where there is no KTP-el / copy of identity from detainees, while the prisoner data information system in prisons cannot provide information regarding valid population data elements such as those contained in KTP-el. So many prisoners cannot be registered as voters. The problem of the availability of ballots is also an obstacle when carrying out voting in prisons, which results in voting starting in the afternoon and finishing at night. Regarding the results of the analysis and valuation of the implementation of the 2019 elections in prisons, the researcher gave several recommendation, including the design of the process of compiling and updating voter data at a Prison with a different mechanism than previously applied. This design aims to reduce the number of detainees who cannot vote, and increase the achievement of inclusive election indicators.

Keywords: prisoners, suffrage, right to vote, inclusive elections